



# Pengaruh Film Dokumenter “*Dirty Vote*” pada Saat Masa Tenang Pemilihan Umum Tahun 2024 di Indonesia

(*The Influence of the Documentary Film “Dirty Vote” on the Quiet Period of the 2024 General Election in Indonesia*)

Angelica Nathaniella<sup>1</sup>, Irwan Triadi<sup>2\*</sup>

<sup>1,2</sup> Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta; [angelicanthaniella@gmail.com](mailto:angelicanthaniella@gmail.com), [irwantriadi1@yahoo.com](mailto:irwantriadi1@yahoo.com)

**Abstrak:** Film dokumenter berjudul *Dirty Vote* dijadwalkan tayang perdana pada 11 Februari 2024, hari tenang menjelang pemilu 2024. Jalur pemilu presiden tahun 2024 dan dugaan insiden-insidennya dibahas dalam *Dirty Vote*. Dalam video yang disutradarai Dandhy Dwi Laksono inif, tim beranggotakan lima pakar mengkaji situasi terkait pemilu melalui kacamata analisis hukum tata negara. Untuk menjaga keutuhan pemilu dan menjamin masyarakat yang menyaksikannya mengetahui kelebihan dan kekurangannya, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman lebih dalam mengenai dampak film dokumenter *Dirty Vote* yang diproduksi pada masa pemilu atau masa tenang menjelang pemilu 2024. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan film *Dirty Vote* berpengaruh terhadap pemilu 2024 di Indonesia karena banyak membahas kecurangan yang terjadi di tatanan negara saat ini serta menyadarkan masyarakat untuk lebih bijak dalam memilih pemimpin di Indonesia.

**Katakunci:** *Dirty Vote*, Pemilu 2024, Masa Tenang

DOI:

<https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i4.2402>

\*Correspondensi: Irwan Triadi

Email: [irwantriadi1@yahoo.com](mailto:irwantriadi1@yahoo.com)

Received: 06-03-2024

Accepted: 18-05-2024

Published: 25-06-2024



**Copyright:** © 2024 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license

(<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

**Abstract:** The documentary film titled “*Dirty Vote*” is scheduled to premiere on February 11, 2024, the calm day before the 2024 election. The presidential election process of 2024 and alleged incidents are discussed in “*Dirty Vote*”. Directed by Dandhy Dwi Laksono, the video features a team of five experts examining the election situation through the lens of constitutional law analysis. Aimed at maintaining the integrity of the election and ensuring that viewers understand its strengths and weaknesses, this research seeks to provide a deeper understanding of the impact of the documentary film “*Dirty Vote*”, produced during the election period or the calm period preceding the 2024 election. This study utilizes a normative legal research method with a literature review approach. The research findings indicate that the film “*Dirty Vote*” has influenced the 2024 election in Indonesia by addressing numerous irregularities in the current state structure and raising awareness among the public to be more discerning in selecting leaders in Indonesia.

**Keywords:** *Dirty Vote*, Election 2024, Quiet Period

## Pendahuluan

Pada Pilpres 2024, tiga pasangan calon satu calon presiden dan satu calon wakil presiden bertemu dalam Deklarasi Kampanye Damai yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN) menjadi pasangan teratas, disusul Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming, serta Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menjadi pasangan ketiga (*Resensi Film Dokumenter “Dirty Vote,”* 2024).

Musim kampanye Pilpres 2024 yang dimulai pada 28 November 2023 dan berakhir pada 10 Februari 2024 resmi dimulai dengan diumumkannya kampanye pemilu yang damai. Lima debat yang menampilkan calon presiden dan wakil presiden diselenggarakan oleh KPU sepanjang kampanye. Memberikan suara dalam pemilihan umum adalah landasan demokrasi di seluruh dunia (*Film "Dirty Vote" Dan Pengaruhnya Terhadap Pemilu 2024*, 2024). Namun, dalam konteks pemilu, terkadang terjadi praktik-praktik yang tidak fair dan melanggar prinsip-prinsip demokrasi. Salah satu fenomena yang sering muncul adalah praktik kecurangan atau "*Dirty Vote*" yang dapat merusak integritas dan legitimasi proses demokratis (Firdaus, 2024).

Pada pemilu 2024, film dokumenter berjudul "*Dirty Vote*" menyoroti tantangan-tantangan yang dihadapi dalam menjaga integritas pemilihan umum. Film ini memperlihatkan beragam praktik curang yang terjadi selama proses pemilu, termasuk penipuan suara, intimidasi pemilih, dan manipulasi hasil. Film dokumenter explanatory berjudul *Dirty Vote* yang di rilis pada 11 Februari 2024 merupakan karya sutradara Dandhy Dwi Laksono (Farhan, 2024). Dalam waktu kurang dari dua hari, video berdurasi 1,5 jam tersebut telah ditonton 1 juta kali di media sosial, membuktikan viralitasnya. *Dirty Vote*, sebuah film dokumenter yang ditayangkan di YouTube, menjadi cukup terkenal.

Meskipun demikian dalam film tersebut tidak hanya menyoroti masalah-masalah yang terjadi selama proses pemilihan umum, tetapi juga memberikan ruang untuk mengeksplorasi solusi-solusi yang mungkin untuk mengatasi tantangan tersebut. Pertama, Film *Dirty Vote* dapat mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pemantauan dan pemantauan proses pemilihan umum (Hertanto, 2023). Melalui kampanye kesadaran masyarakat dan pelatihan, masyarakat dapat belajar bagaimana melaporkan potensi kecurangan dan memastikan bahwa suara mereka dihitung dengan benar. Kedua, sistem pemilu harus diubah agar masyarakat lebih percaya dan lebih terbuka serta akuntabel.

Ini mungkin termasuk reformasi hukum pemilihan, penggunaan teknologi untuk memperkuat integritas pemilihan, dan perubahan dalam struktur lembaga-lembaga pemilihan (Arifianto, 2023). Dalam konteks ini, penelitian bertujuan untuk menyelami esensi "*Dirty Vote*" sebagai bukan sekadar sebuah karya audio-visual, tetapi juga sebagai cerminan nyata tantangan-tantangan yang dihadapi dalam menjaga integritas pemilihan umum. Melalui analisis mendalam terhadap naratif, gambaran, dan pesan yang tersemat dalam film, Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang dampak film yang kita konsumsi dengan bijak serta mendapatkan pemahaman yang baik dalam proses pemilihan umum yang terjadi di Indonesia sebagai warga negara yang taat demokrasi dan aturan (Shaleha, 2023).

## Metode

Penelitian ini menggunakan metodologi yuridis normatif berdasarkan kajian pustaka sebagai strategi penelitiannya. Salah satu pendekatan kajian hukum adalah metode yuridis normatif, yang menggunakan sumber sekunder dan artikel ilmiah. Tinjauan literatur dilakukan untuk mengumpulkan sumber hukum untuk penelitian ini. Hal ini mencakup pencarian dan pengumpulan peraturan dan literatur hukum yang relevan,

seperti undang-undang, jurnal, dan pandangan para ahli mengenai kasus-kasus yang dicakup. Dalam pendekatan studi pustaka terhadap pengaruh film dokumenter "*Dirty Vote*" pada masa tenang pemilihan umum tahun 2024 di Indonesia menunjukkan kompleksitas hubungan antara kebebasan berbicara, pengawasan media, dan proses demokrasi. Penanganan kasus semacam ini membutuhkan keseimbangan antara perlindungan terhadap proses demokrasi dan hak asasi manusia dengan pengawasan yang efektif terhadap pelanggaran hukum yang mungkin terjadi.

## Hasil dan Pembahasan

### A. Pengaruh film "*Dirty Vote*" Terhadap Publik

Film "*Dirty Vote*" merupakan salah satu konten kontroversial atau provokatif dapat memiliki berbagai pengaruh terhadap masyarakat. Pengaruh tersebut yang mungkin timbul. Penting untuk diingat bahwa pengaruh film terhadap masyarakat bisa sangat bervariasi tergantung pada konteks sosial, budaya, dan politik di mana film tersebut diterima. Film seperti "*Dirty Vote*" seringkali memunculkan perdebatan dan diskusi di antara masyarakat tentang topik-topik yang diangkat dalam film tersebut. Ini dapat menyebabkan masyarakat mempertimbangkan sudut pandang yang berbeda-beda, menggali lebih dalam tentang isu-isu yang diperkenalkan dalam film, dan membentuk pendapat mereka sendiri.

Meski sudah ditonton lebih dari 6,7 juta kali, tetap saja ada pro dan kontra terhadap gambar ini. Konten film tersebut terus memicu perbincangan di media sosial. "Film ini dinilai mampu mengedukasi masyarakat tentang betapa curangnya pemilu kita dan bagaimana politisi memanipulasi pemilih masyarakat hanya untuk memenangkan kepentingannya," ujar sineas tersebut (*Pancasila Dan Politik Emansipasi: Problematisasi Politik Identitas Menuju Pemilu 2024*, 2024). Upaya untuk menggambarkan *Dirty Vote* sebagai kampanye Hitam, menurut Masyarakat Sipil, mendelegitimasi kritik dan fakta film tersebut. Namun, film dokumenter tersebut tidak bertujuan untuk membantu atau merugikan kandidat tertentu dalam pemilu, seperti klaim Ika. Sebenarnya lebih tepat jika dikatakan bahwa film dokumenter ini merupakan analisis kritis yang diambil dari berbagai sumber jurnalistik. Ika mengklaim tuduhan yang dilayangkan DPP Foksi memiliki pola yang sama dengan pembelaan pemerintah terhadap kritik sebelumnya (Qodir, 2023). Taktik umum dalam pola ini adalah meragukan para kritikus atau pelapor dengan melontarkan tuduhan yang tidak berdasar, seperti menghubungkan mereka dengan lawan politik atau bahkan menyatakan bahwa mereka terlibat dalam pembunuhan pembawa pesan.

Film dengan konten kontroversial seperti "*Dirty Vote*" mungkin memicu protes atau kontroversi dari kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat yang merasa tersinggung atau tidak setuju dengan pesan atau representasi dalam film tersebut selain itu juga hal ini sangat dapat merugikan pihak tertentu karena dapat mempengaruhi perilaku masyarakat, terutama jika mereka menampilkan adegan-adegan yang mungkin memengaruhi tindakan atau pandangan mereka terhadap

suatu masalah (Larasati, 2023). Misalnya, film yang menampilkan kekerasan politik dapat mempengaruhi sikap seseorang terhadap kekerasan dalam kehidupan nyata. Penting untuk diingat bahwa pengaruh film terhadap masyarakat bisa sangat bervariasi tergantung pada konteks sosial, budaya, dan politik di mana film tersebut diterima. Selain itu, tanggapan terhadap film tertentu dapat sangat subjektif dan dipengaruhi oleh pengalaman dan nilai-nilai individual.

Tujuan dari *Dirty Vote* adalah untuk menyebarkan kesadaran akan nilai kejujuran, integritas, dan perjuangan melawan kesombongan orang-orang yang berkuasa dalam sistem demokrasi (Wisnubroto, 2022). Film ini menunjukkan betapa mudahnya demokrasi dimanipulasi dan bagaimana hal ini dapat berdampak pada nasib suatu bangsa. Film ini mendorong pemirsa untuk mengambil sikap dan mengambil tindakan demi perubahan yang lebih baik melalui kaca mata tokoh utamanya (Mandhasiya, 2022). Penonton mungkin akan sangat terpengaruh oleh film *Dirty Vote*, terutama mereka yang mempunyai ketertarikan pada politik dan masalah sosial. Melalui penggambaran manipulasi politik yang realistis, film ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dan menginspirasi mereka untuk berpartisipasi dalam perubahan sosial dan politik (*Pengamat Nilai Film Dirty Vote Pengaruhi Segmen Pemilih Kelas Menengah*, 2024).

*Dirty Vote* relevan mengingat iklim sosial dan politik saat ini, khususnya di beberapa negara yang menghadapi masalah demokrasi dan kepemimpinan. Video tersebut menunjukkan bahwa isu manipulasi politik dan keangkuhan otoritas bersifat global dan bersifat transhistoris, serta berdampak pada negara-negara dari segala ukuran dan jenis (Husin, 2019). Film *Dirty Vote* tidak hanya menceritakan narasi yang menarik; hal ini juga memberikan pesan yang kuat tentang perlunya bersikap jujur dan menentang orang-orang berwenang yang berperilaku sewenang-wenang. Film ini mungkin bisa menjadi wahana perubahan sosial karena dampaknya terhadap penonton dan kesesuaiannya dengan iklim politik dan sosial saat ini.

Oleh karena itu, film tersebut diyakini dapat membantu menentukan siapa yang akan menerima amanah rakyat menjelang pemilu 2024 dan persiapan putaran kedua. Bersama-sama, kita dapat memperkuat prinsip-prinsip Indonesia dan mengambil keputusan, mengakui bahwa kepentingan kemanusiaan dan nasional lebih diutamakan daripada politik.

#### **B. Peran Lembaga Pemerintah dalam Isu Kecurangan Pemilu pada Film “*Dirty Vote*”**

Film *Dirty Vote* menceritakan kejadian menjelang pemilu 2024, termasuk klaim Presiden Jokowi memberikan syarat tertentu. Dalam film ini, Presiden Jokowi memerankan salah satu dalang yang merusak demokrasi Indonesia dengan memanfaatkan institusi pemerintah untuk mempertahankan otoritasnya (Sumaktoyo, 2021). Selain itu, presiden dinilai tidak netral karena menunjukkan dukungan terhadap calon wakil presiden dan calon presiden pada paslon kedua. Sangat sedikit pembicaraan membahas calon orang lain (*Pemilu Dan Pilkada Serentak 2024: Alasan, Urgensi, Dan Tantangan*, 2022).

Rahmat Bagja, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), mengimbau masyarakat untuk tidak membiarkan film ini menimbulkan keresahan atau mengganggu pemilu. Dia menyarankan untuk tidak melakukan apa pun yang dapat menimbulkan masalah karena pemungutan suara telah dimulai. Selain itu, Hasyim Asyari, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), meminta pihak terkait mengkaji ulang kerja ahli yang dilakukan komisinya. Baginya, yang terpenting adalah KPU beroperasi dengan imparcialitas dan integritas, serta mematuhi peraturan yang profesional (Firmansyah, 2020). Selain itu, menjadi tanggung jawab seluruh pihak dan organisasi terkait, seperti KPU dan Bawaslu, untuk menjamin proses pemilu yang lancar, jujur, dan adil.

Namun jika skenario spekulatif ini ternyata benar, maka penilaian Kampanye Pemilu Tipis mengenai dampak buruk terhadap demokrasi juga sah, karena KPU yang harusnya tetap netral dalam pemilu mengambil sikap yang memihak salah satu pasangan calon. Kritik terhadap ketidakberpihakan para pejabat negara yang disebutkan dalam "*Dirty Vote*" (Suara Kotor) juga menjadi bahan pembelajaran yang sama pentingnya, karena pernyataan netralitas yang tegas dari Presiden Jokowi juga terbukti menjadi retorika kosong yang patut dipertanyakan (*Pemilu 2024: Pilih Muda, Politik Dinasti, Dan Potensi Polarisasi - Sejumlah Hal Yang Perlu Anda Ketahui*, 2023). Meskipun demikian, UU Pemilu menetapkan bahwa presiden dan menteri boleh berkampanye selama mereka sedang cuti dan tidak menggunakan fasilitas pemerintah, sehingga hal ini tidak sepenuhnya sah dan tidak etis, apalagi sesuai (Mujani, 2020). Para narasumber melakukan klarifikasi dan perdebatan dalam "*Dirty Vote*" "Apakah mereka menjalankan urusan resmi atau mencalonkan diri sebagai wakil negara, seperti presiden, menteri, atau lainnya? Ini adalah beberapa isu penting yang juga disinggung oleh film dokumenter ini.

Menurut sumber "*Dirty Vote*", Presiden Jokowi memiliki sikap yang tidak netral. Selain pernyataan Jokowi bahwa presiden mungkin mencalonkan diri, laporan menyebutkan bahwa Jokowi telah menyiapkan kontes untuk memilih Prabowo Gibran sebagai pasangannya (*Kru Dirty Vote Dipolisikan, Koalisi: Kritik Jangan Dibungkam*, 2024). dengan menunjuk pendukung, anggota keluarga presiden, atau mantan rekan kerja sebagai Penjabat Gubernur, Menteri, Kapolri, dan Personil Militer. Hal itu kemudian dimanfaatkan Jokowi untuk mengumpulkan sumber daya demi mendukung paslon 02.

Meski pihak-pihak yang terlibat persaingan politik biasanya memandang film tersebut dari berbagai sudut pandang, namun jawaban TKN Prabowo-Gibran menunjukkan bahwa film ini juga memiliki muatan politik (*Kritik Tegas Terhadap Pemilu 2024 Dalam Film "Dirty Vote,"* 2024). Hal ini menekankan pentingnya mempertimbangkan informasi dari berbagai sudut dan perlunya mengkonfirmasi dan memvalidasi informasi yang diperoleh. Kritik terhadap Pemilu 2024 yang diangkat dari film "*Dirty Vote*" dapat dipecah menjadi beberapa kategori:

- 1. Politik Bansos:** Film ini mengkritik politik tong babi, atau politik bantuan sosial, yang menggunakan dana publik untuk memajukan agenda politik

tertentu. Hal ini menunjukkan bagaimana dana dan wewenang publik dapat dieksploitasi untuk kepentingan agenda politik tertentu, sehingga dapat merugikan demokrasi.

2. **Kecurangan Sistematis:** Film ini secara metodis mengungkap insiden-insiden yang konon berkaitan dengan pemilu tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pemilu masih mempunyai kelemahan yang memungkinkan terjadinya manipulasi dan keadaan yang tidak menguntungkan (Chen, 2022). Hal ini menekankan bagaimana sistem pemilu harus direformasi untuk meningkatkan integritas dan keterbukaannya.
3. **Pemaknaan Demokrasi:** Selain itu, film ini mengajak penonton untuk mempertimbangkan apa sebenarnya arti demokrasi (Mahsun, 2021). Apakah demokrasi hanya sebuah sistem untuk memilih pemimpin, ataukah demokrasi juga merupakan sebuah sistem yang dibangun atas dasar keadilan, keterbukaan, dan keterlibatan warga negara.
4. **Pendekatan Partisan:** Kritikus juga menyoroti fakta bahwa film ini mungkin dipandang sebagai senjata propaganda politik yang bias. Hal ini dapat menyebabkan perpecahan sosial dan mengikis kepercayaan terhadap sistem demokrasi secara keseluruhan.

Jadi, "*Dirty Vote*" mengkritisi proses pemilu di Indonesia dan membuat penonton bertanya-tanya tentang objektivitas dan motivasi film tersebut (Assyaukanie, 2019). Setiap anggota masyarakat Indonesia harus memandang video ini dengan skeptis dan berupaya memperbaiki proses politik dan pemilu di negara ini.

Kejujuran dan keandalan aparat penegak hukum juga akan diuji. Semua ini penting karena menunjukkan betapa seriusnya kami menjalankan tanggung jawab untuk mengawasi dan memulai proses demokrasi, termasuk pemilu, di Indonesia. Hanya dengan cara inilah demokrasi kita dapat memenuhi janjinya dan tidak dijadikan pion oleh kepentingan-kepentingan yang kuat.

### C. *Dirty Vote* Tayang saat Masa Tenang Pemilu 2024

Dalam sebuah wawancara, pembuat film *Dirty Vote* Dandhy Dwi Laksono membahas alasan film dokumenter tersebut diterbitkan di luar musim pemilu 2024. Menjelang pemilu 2024, Dandhy menyatakan sebaiknya penonton memandang film ini sebagai tontonan yang informatif dan mawas diri. Dandhy berterus terang tentang keinginannya agar *Dirty Vote* menimbulkan banyak perdebatan. Sebagai sesama warga negara Indonesia, ia menghimbau agar semua pihak mengesampingkan biasnya sejenak dan menikmati film tersebut secara utuh.

Dalam *Dirty Vote*, tiga pakar hukum tata negara Bivitri Susanti, Feri Amsari, dan Zainal Arifin Mochtar menjelaskan dugaan kejadian yang terjadi sepanjang proses pemilu 2024. Pada hari Minggu, 2/11, pukul 11:00 WIB, film ini dirilis. Sejumlah organisasi dan kelompok bekerja sama untuk membuat film *Dirty Vote*. Antara lain: AJI, Bangsa Mahardika, Ekspedisi Indonesia Baru, Ekuatorial, Greenpeace Indonesia, Kalimantan, Jatam, Jeda untuk Iklim, KBR, LBH Pers,

Lokataru, Lucudem, Salam 4 Jari, Satya Bumi, Themis Indonesia, Walhi, Yayasan Dewi Keadilan, Yayasan Kurawal, dan YLBHI (*Isi Film Dirty Vote Bongkar Berbagai Kecurangan Pemilu 2024 Yang Terstruktur, Sistematis, Dan Masif*, 2024).

Dana untuk produksi video ini diperoleh melalui beberapa platform crowdfunding, termasuk kontribusi dari individu dan lembaga, termasuk Joni Aswira, Ketua Umum Masyarakat Jurnalis Lingkungan Hidup Indonesia (SIEJ). Jadi, menurut hipotesis Kampanye Pemilu Tipis, Presiden Jokowi jelas-jelas mengabaikan norma-norma demokrasi (*Di Balik Film Dirty Vote*, 2024). Inilah sebabnya mengapa "Dirty Vote" (Suara Kotor) menjadi kontroversi, terutama karena hal ini terjadi pada fase lambat pemilu; Laporan ini juga menyoroti beberapa manfaat dan kerugian sosial, khususnya bagi partai dan pasangan kandidat yang ditampilkan dalam film dokumenter tersebut. Ketertarikan publik terhadap video *Dirty Vote* menyebabkan video tersebut dilarang di YouTube setelah debutnya (Suciati, 2019). Selama periode dua hari yang menggambarkan pemilu 2024 yang relatif tenang, *Dirty Vote* mengumpulkan puluhan ribu komentar dan 6.901.838 penayangan. Film *Dirty Vote* diputar di tengah suasana pemilu yang relatif tenang karena:

1. Adanya kerusakan demokrasi jelang Pilpres 2024

Suara Kotor dilontarkan pakar hukum Bivitri Susanti yang menyebut tujuan video tersebut untuk menunjukkan betapa rusaknya proses demokrasi menjelang pemilu presiden. Bivitri menekankan bahwa motivasinya menjadi bagian dalam pembuatan film tersebut adalah untuk menarik perhatian terhadap bencana besar. "Saya ingin terlibat dalam film ini karena semakin banyak orang yang memahami bahwa banyak sekali keadaan luar biasa yang membuat pemilu ini tidak bisa dianggap baik," ujarnya penuh keyakinan dalam *Dirty Vote*.

Agar proses pemilu tetap berjalan lancar, tegas Bivitri, keadaan yang terjadi tidak boleh diabaikan (Subekti, 2021). Menurutnya, penggambaran desain kecelakaan dalam film tersebut hanya sekedar tipikal. Menurutnya, pemerintahan masa lalu, baik di dalam maupun luar negeri, telah mengikuti pola ini, dan skenario saat ini hanyalah contoh terbaru.

2. Tontonan reflektif di masa tenang pemilu 2024

*Dirty Vote* ditayangkan di masa sepi Pilpres 2024 karena alasan yang diungkapkan sineas Dandhy Dwi Laksono. Ia mengklaim bahwa tujuan film tersebut ditayangkan di luar jam sibuk adalah untuk menarik banyak perhatian sebelum pemungutan suara dibuka (Santoso, 2021).

Terlepas dari kecenderungan politik seseorang, dia mendorong semua orang untuk menonton film ini. Di tengah suasana yang relatif sepi menjelang pemilu presiden, Dhandy menilai film ini berpotensi menjadi instrumen refleksi sosial yang ampuh. Ia berharap dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang beberapa isu terkait pemilu melalui film ini juga (*Kenapa Dirty Vote Tayang Di Masa Tenang Pilpres 2024?* 2024). Taktik manipulasi yang banyak digunakan dalam penipuan ini antara lain penggelapan keuangan desa dan kenaikan anggaran bansos menjelang pemilu.

### 3. Mendidik publik tentang kecurangan Pemilu

Alasan kedua untuk menyebarkan Suara Kotor adalah untuk memberikan informasi kepada pemilih tentang keadaan pemilu presiden. Film tersebut, menurut Feri, mungkin bisa mengungkap taktik curang yang terjadi saat pemilu. Dan dia berharap film ini akan menunjukkan bagaimana politisi menggunakan kepentingan khusus untuk memajukan agenda mereka sendiri. Semua persiapan negara dilakukan secara besar-besaran, terorganisir, dan metodis, seperti yang ditunjukkan Feri. Ia menegaskan rangkaian upaya kecurangan pemilu bukan terjadi secara tiba-tiba.

### 4. Menjadi landasan untuk menghukum para pelanggar Pemilu 2024

Alasan lain untuk memberikan sanksi terhadap pelanggaran pada tahun 2024 adalah penayangan *Dirty Vote* selama masa tenang pemilu. Zainal Arifin Mochtar mengutarakan hal tersebut dalam filmnya *Dirty Vote*. Tragedi tersebut diyakini direkayasa oleh pihak-pihak yang berkuasa, namun Zainal mengindikasikan bahwa *Dirty Vote* mengungkap rancangannya.

Orang atau orang-orang yang sekarang bertanggung jawab kemungkinan besar akan memutuskan bagaimana kriteria ini disusun, katanya. Zainal sekali lagi menggarisbawahi bahwa pihak berwenang sekarang dapat melindungi kepentingan mereka dengan menggunakan infrastruktur dan sumber daya negara.

## Simpulan

Warganet yang bersangkutan meragukan penggunaan Pasal 287 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang dilakukan pelapor sebagai sarana untuk menjebak keempat responden. Sementara pemilu berlangsung di balik layar, wartawan mengatakan bahwa Suara Kotor adalah sebuah ketentuan. *Dirty Vote* diduga merupakan kampanye hitam, atau kampanye hitam terhadap calon presiden atau wakil presiden, menurut media tersebut. Aspek hukum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilu, khususnya Pasal 280 dan 287, memperkuat narasi kelam kampanye tersebut. Penyiaran atau publikasi fakta-fakta pelanggaran pemilu seperti yang terdapat pada Suara Kotor sama sekali tidak dilarang berdasarkan Pasal 280 ayat (1) hingga (4) yang mengatur tentang pembatasan kampanye pemilu. Sebagai media, "*Dirty Vote*" menyampaikan pesan moral yang tajam tentang politik dan integritas pemilih. Film ini menyadarkan kita betapa pentingnya waspada terhadap situasi seperti ini dan berpartisipasi aktif dalam demokrasi kita. Cara lain "*Dirty Vote*" menunjukkan bagaimana kata-kata dapat mempengaruhi opini publik adalah melalui penggunaan metafora. Perlunya berkomunikasi dengan kejujuran dan integritas telah disoroti oleh pernyataan kontroversial yang dibuat oleh tokoh politik terkemuka.

Mengenai kemungkinan keadaan pemerintah desa dan contoh manipulasi tingkat lokal lainnya, film ini berfungsi sebagai pengingat. Setiap suara dan tindakan sangat berarti bagi kredibilitas pemilu, dan dengan mengangkat hal ini pada tingkat yang mendasar, tujuannya adalah agar masyarakat menyadari hal ini. Singkatnya, "*Dirty Vote*" mengajak pemirsa untuk melakukan refleksi kritis, menarik kesimpulan, dan menolak desakan agar

skenario tersebut menjadi prosedur operasi standar di negara demokrasi. Masyarakat Indonesia dapat menciptakan masa depan politik yang lebih adil dan terbuka melalui belas kasih dan persatuan, seperti yang disoroti dalam video ini. Hal ini juga memuji kemampuan individu untuk membawa perubahan konstruktif.

## Saran

Menulis artikel tentang film "*Dirty Vote*" adalah suatu kesempatan yang menarik untuk menggali lebih dalam tentang berbagai aspek kontroversi, dampak sosial, dan pesan yang terkandung di dalamnya selama proses pemilu berlangsung. Oleh karena itu, dalam menanggapi "*Dirty Vote*", kita perlu melampaui sekadar reaksi emosional atau penolakan terhadap konten yang kontroversial. Kita ditantang untuk menjadikan film ini sebagai momentum refleksi diri, untuk mengeksplorasi posisi kita dalam sistem politik yang dihadapi, serta untuk mempertimbangkan tindakan konkrit yang dapat kita ambil dalam memperbaiki proses demokrasi.

Sebagai penutup, "*Dirty Vote*" bukanlah akhir dari perdebatan, tetapi awal dari pembaharuan. Dengan membuka ruang diskusi yang jujur dan terbuka, kita dapat mengarahkan perubahan yang positif dan membentuk masyarakat yang lebih baik. Film ini adalah sebuah panggilan untuk memperjuangkan nilai-nilai demokrasi yang kita yakini, serta untuk membangun fondasi politik yang kokoh bagi generasi mendatang.

## Daftar Pustaka

- Arifianto, A. R. (2023). The 2024 Indonesian Election: A Crossroads in a Continuing Democratic Recession. *New Zealand Journal of Asian Studies*, 25(2), 37–56.
- Assyaukanie, L. (2019). Religion as a political tool secular and islamist roles in Indonesian elections. *Journal of Indonesian Islam*, 13(2), 454–479. <https://doi.org/10.15642/JIIS.2019.13.2.454-479>
- Chen, J. (2022). Representing Chinese Indonesians: Pribumi Discourse and Regional Elections in Post-Reform Indonesia. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 41(1), 59–87. <https://doi.org/10.1177/186810342111036716>
- Di balik film *Dirty Vote*. (2024).
- Farhan, F. B. (2024). Persuasive languages on political billboard of the 2024 Indonesian General Election in Padang City West Sumatra, Indonesia. *Cogent Arts and Humanities*, 11(1). <https://doi.org/10.1080/23311983.2024.2325679>
- Film "*Dirty Vote*" dan pengaruhnya terhadap Pemilu 2024. (2024).
- Firdaus, A. A. (2024). Indonesian presidential election sentiment: Dataset of response public before 2024. *Data in Brief*, 52. <https://doi.org/10.1016/j.dib.2023.109993>
- Firmansyah, F. (2020). Comparing Sentiment Analysis of Indonesian Presidential Election 2019 with Support Vector Machine and K-Nearest Neighbor Algorithm. *6th International Conference on Computing, Engineering, and Design, ICCED 2020*. <https://doi.org/10.1109/ICCED51276.2020.9415767>
- Hertanto. (2023). Youth Political Perception Towards the Indonesian 2024 Election. *Croatian International Relations Review*, 29(93), 315–332. <https://doi.org/10.2478/CIRR-2023-0065>

- Husin, L. H. (2019). Beyond the binary logic of populist articulations in 2019 Indonesian election: A post-structuralist analysis of “sexy killers” documentary. *Central European Journal of International and Security Studies*, 13(4), 411–431.
- Isi Film Dirty Vote Bongkar Berbagai Kecurangan Pemilu 2024 yang Terstruktur, Sistematis, dan Masif.* (2024).
- Kenapa Dirty Vote Tayang di Masa Tenang Pilpres 2024?* (2024).
- Kritik Tegas terhadap Pemilu 2024 dalam Film “Dirty Vote.”* (2024).
- Kru Dirty Vote Dipolisikan, Koalisi: Kritik Jangan Dibungkam.* (2024).
- Larasati, Y. G. (2023). Past preferences informing future leaders for Indonesian 2024 general elections. *Cogent Social Sciences*, 9(1). <https://doi.org/10.1080/23311886.2023.2229110>
- Mahsun, M. (2021). Female Candidates, Islamic Women’s Organisations, and Clientelism in the 2019 Indonesian Elections. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 40(1), 73–92. <https://doi.org/10.1177/1868103420988729>
- Mandhasiya, D. G. (2022). Evaluation of Machine Learning Performance Based on BERT Data Representation with LSTM Model to Conduct Sentiment Analysis in Indonesian for Predicting Voices of Social Media Users in the 2024 Indonesia Presidential Election. *ICOIACT 2022 - 5th International Conference on Information and Communications Technology: A New Way to Make AI Useful for Everyone in the New Normal Era, Proceeding*, 441–446. <https://doi.org/10.1109/ICOIACT55506.2022.9972206>
- Mujani, S. (2020). Who believed misinformation during the 2019 Indonesian Election? *Asian Survey*, 60(6), 1029–1043. <https://doi.org/10.1525/AS.2020.60.6.1029>
- Pancasila dan Politik Emansipasi: Problematisasi Politik Identitas Menuju Pemilu 2024.* (2024). 3(2), 13–32.
- Pemilu 2024: Pemilih muda, politik dinasti, dan potensi polarisasi - Sejumlah hal yang perlu Anda ketahui.* (2023).
- Pemilu dan Pilkada Serentak 2024: Alasan, Urgensi, dan Tantangan.* (2022).
- Pengamat Nilai Film Dirty Vote Pengaruhi Segmen Pemilih Kelas Menengah.* (2024).
- Qodir, Z. (2023). Artificial Intelligent, Digital Democracy and Islamic Party in Indonesian Election 2024. *Lecture Notes in Networks and Systems*, 693, 1045–1055. [https://doi.org/10.1007/978-981-99-3243-6\\_85](https://doi.org/10.1007/978-981-99-3243-6_85)
- Resensi Film Dokumenter “Dirty Vote.”* (2024).
- Santoso, D. H. (2021). New media and nationalism in indonesia: An analysis of discursive nationalism in online news and social media after the 2019 indonesian presidential election. *Jurnal Komunikasi: Malaysian Journal of Communication*, 37(2), 289–304. <https://doi.org/10.17576/JKMJC-2021-3702-18>
- Shaleha, S. (2023). Sentiment Analysis with Supervised Topic Modelling on Twitter Data Related to Indonesian Election 2024. *Proceedings - 2023 10th International Conference on Computer, Control, Informatics and Its Applications: Exploring the Power of Data: Leveraging Information to Drive Digital Innovation, IC3INA 2023*, 37–42. <https://doi.org/10.1109/IC3INA60834.2023.10285800>
- Subekti, D. (2021). Analysis of Twitter’s Election Official as Tools for Communication and Interaction with Indonesian Public During the 2019 Presidential Election in Indonesia.

---

*Advances in Intelligent Systems and Computing*, 1352, 309–323.  
[https://doi.org/10.1007/978-3-030-71782-7\\_28](https://doi.org/10.1007/978-3-030-71782-7_28)

Suciati, A. (2019). Twitter Buzzer Detection for Indonesian Presidential Election. *ICICOS 2019 - 3rd International Conference on Informatics and Computational Sciences: Accelerating Informatics and Computational Research for Smarter Society in The Era of Industry 4.0, Proceedings*. <https://doi.org/10.1109/ICICoS48119.2019.8982529>

Sumaktoyo, N. G. (2021). Ethnic And Religious Sentiments in Indonesian Politics: Evidence from the 2017 Jakarta Gubernatorial Election. *Journal of East Asian Studies*, 21(1), 141–164. <https://doi.org/10.1017/jea.2020.35>

Wisnubroto, A. S. (2022). Opinion-based sentiment analysis related to 2024 Indonesian Presidential Election on YouTube. *2022 5th International Seminar on Research of Information Technology and Intelligent Systems, ISRITI 2022*, 318–323. <https://doi.org/10.1109/ISRITI56927.2022.10052848>